

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat:

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;

3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kabupaten Lamongan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022;
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.
25. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

## **B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan kami mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

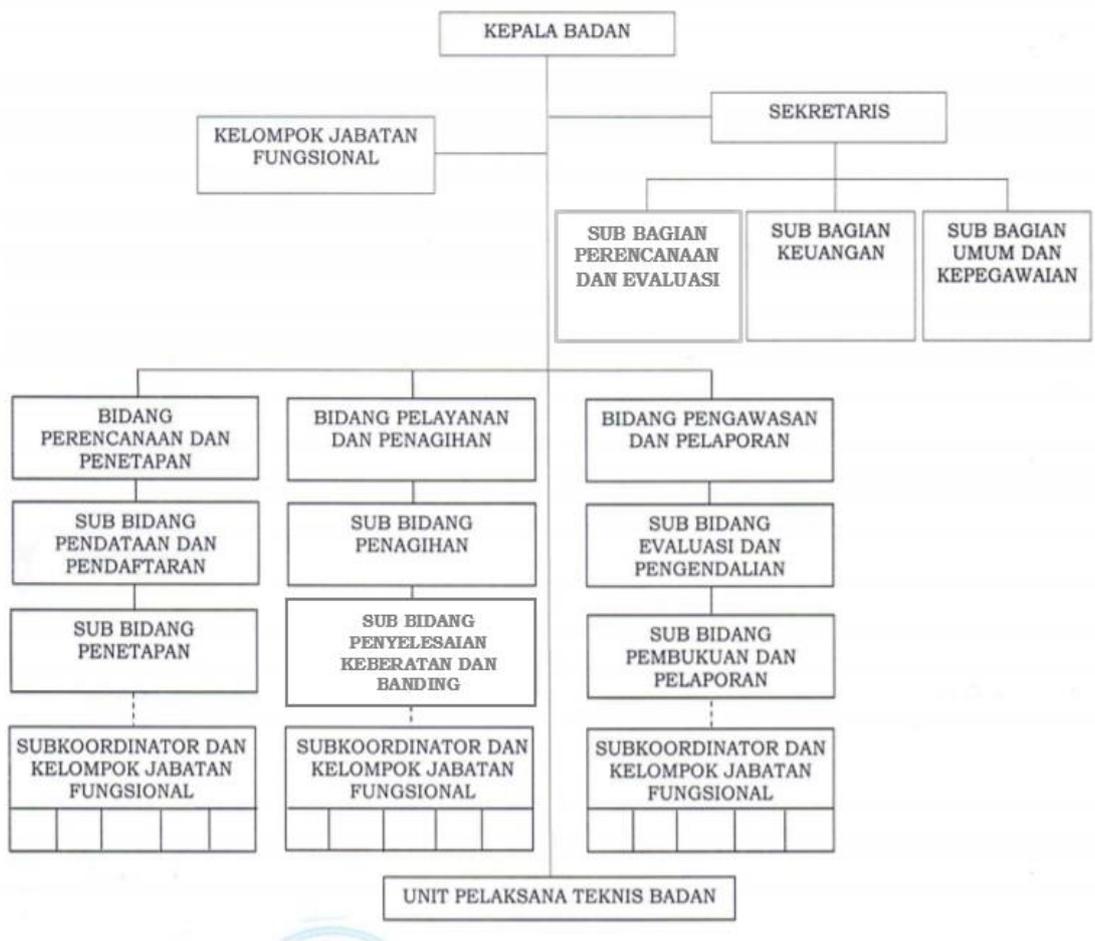
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan dan Penetapan;
  - a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
  - b. Sub Bidang Penetapan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pelayanan dan Penagihan;
  - a. Sub Bidang Penagihan;
  - b. Sub Bidang Penyelesaian Keberatan dan Banding;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengawasan dan Pelaporan;
  - a. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian;
  - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1. 1  
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan



Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

### **1. Sekretariat**

Memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

### **2. Bidang Perencanaan dan Penetapan**

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Perencanaan dan Penetapan.

### **3. Bidang Pelayanan dan Penagihan**

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pelayanan dan Penagihan.

### **4. Bidang Pengawasan dan Pelaporan**

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pengawasan dan Pelaporan.

## C. Data Umum Organisasi

### 1. Personil

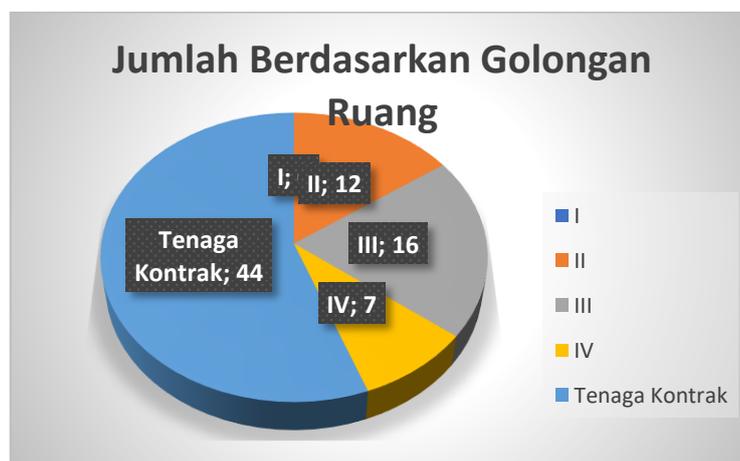
Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2023 sebanyak 79 orang, dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang  
Tahun 2023

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	I	-
2	II	12
3	III	16
4	IV	7
5	Tenaga Kontrak	44
<b>Total</b>		<b>79</b>

Gambar 1.2

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang  
Tahun 2023

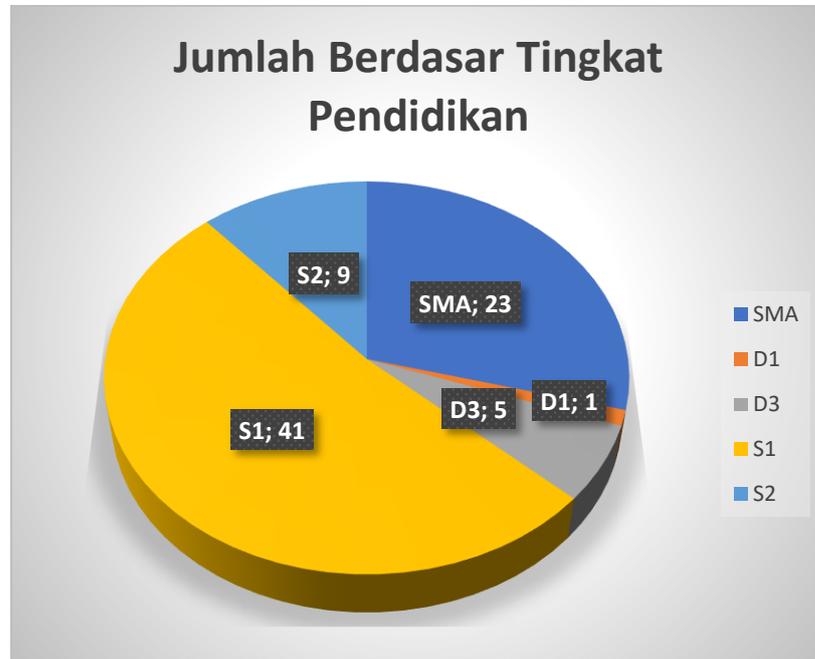


Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang terbesar adalah golongan III berjumlah 16 orang (20%) selanjutnya golongan IV berjumlah 7 orang (9%), golongan II berjumlah 12 orang (15%), adapun untuk tenaga kontrak berjumlah 44 orang (56%).

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	23
2	D1	1
2	D3	5
3	S1	41
4	S2	9
<b>Total</b>		<b>79</b>

Gambar 1.3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2023

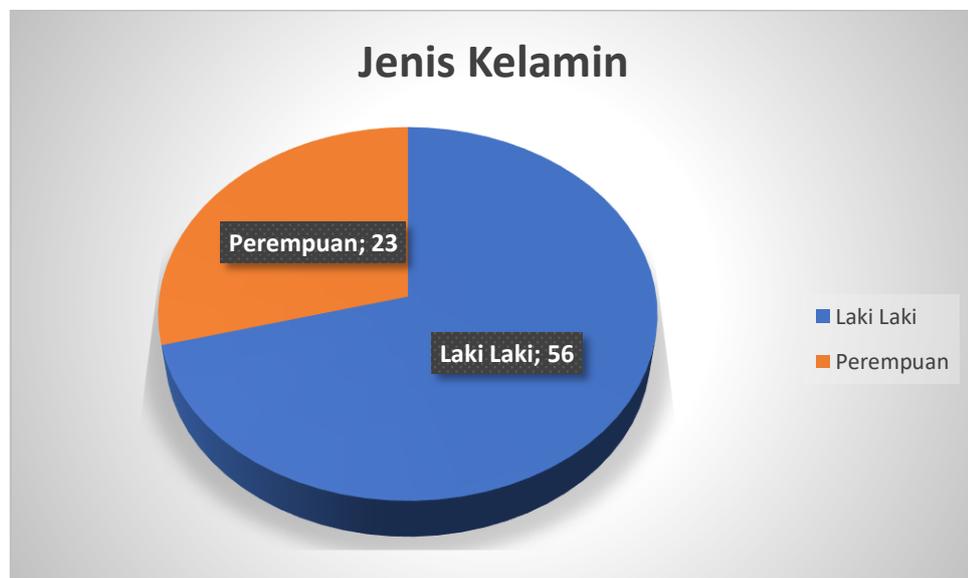


Jika dilihat dari tingkat Pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat S1 berjumlah 41 orang atau 52%, selanjutnya tingkat S2 berjumlah 9 orang (12%), SMA berjumlah 23 orang atau (29%) , D3 berjumlah 5 orang (6%) dan DI berjumlah 1 orang (1%).

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	56
2	Perempuan	23
<b>Total</b>		<b>79</b>

Gambar 1.4  
Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin  
Tahun 2023



Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dengan persentase terbesar adalah pegawai laki-laki berjumlah 56 orang atau 71%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 23 orang atau 29%.

## 2. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NAMA	JUMLAH
AC Unit	21
Alat Penghancur Kertas	2
Almari	19
Meja	71
Kamera Drone (Kamera Drone)	1
Camera + Attachmen (Kamera)	7
CCTV	6
Digital Multimeter	2
Facsimile (Facsimile)	1
Gigabit Router (Router)	1
GPS (GPS)	2
Handycam	2
Hardisk Server	2
Kabel HDMI ( )	4
Kursi	59
Lap Top	4
Laser Distance Meter	1
Laser Lecia Disto	1
Televisi	5
Mainframe	4
Mesin Hitung Manual	1
meteran	1
Mixer PVC	1
Note Book	22
P.C. Unit	47
Papan Pengumuman	5
Professional Sound System ( )	1
Perforator Besar (Perforator Besar)	2
perlengkapan reklame (perlengkapan reklame)	1
Printer (Printer)	33
Proyektor + Attachment (Proyektor + Attachment)	2
Rol Meter (Roll Meter)	6
Router (Routerboard)	1
Scanner (Scanner)	3
Station Wagon (Station Wagon)	5
Sepeda Motor (Sepeda Motor)	52
Server (Server)	1

Sofa (Sofa)	3
Solid State Disk (Solid State Disk)	5
SSD Server (SSD ( perangkat server))	2
Switch HUB (Mikrotik )	5
Telephone	2
Theodolite ( )	2
UPS (UPS)	6
White Board Elektronik (White Board Elektronik)	1
Total	<b>425</b>

Sumber: Kartu Inventaris Bapenda, 2023

### 3. Pembiayaan

Pada tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 20.436.222.900,00. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan sebagaimana tabel berikut

Tabel 1.5  
Anggaran Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>14.161.336.805,00</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>130.000.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	55.000.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.000.000,00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>12.085.986.505,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.995.986.505,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000,00
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>245.361.000,00</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	53.000.000,00
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	192.361.000,00

<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>212.997.000,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.686.000,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.238.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.950.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.529.800,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.600.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.993.200,00
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>150.915.000,00</b>
1	Pengadaan Mebel	6.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	144.915.000,00
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.018.271.400,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.600.000,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	412.486.000,00
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.217.400,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	585.968.000,00
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>317.805.900,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.500.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.305.900,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.000.000,00
<b>B</b>	<b>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	<b>6.274.886.095,00</b>
<b>I</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>6.274.886.095,00</b>
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	40.000.000,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	0
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	216.969.000,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	75.000.000,00
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.026.500.000,00

6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15.000.000,00
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	30.000.000,00
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	514.438.500,00
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	253.040.000
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	115.040.500,00
11	Penagihan Pajak Daerah	3.287.000.000,00
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.000.000,00
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	380.110.000,00
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	297.858.095,00
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	3.930.000,00
<b>Total Anggaran</b>		<b>20.436.222.900,00</b>

#### **D. Sistematika Pelaporan**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Pada bab ini disajikan pula data umum organisasi yang meliputi personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

##### **2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Pada bab ini disajikan pula rencana kinerja yang meliputi

program dan kegiatan tahun 2023, serta disajikan pula perjanjian kinerja tahun 2023 mulai pejabat tertinggi sampai staf.

### **3. Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi tahun 2023, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir RPJMD dan dengan realisasi nasional. Disajikan pula analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan dan analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya serta realisasi anggaran tahun 2023.

### **4. Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan mengenai perencanaan dan akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2023. Dalam bab ini disajikan pula permasalahan dan solusi yang ditempuh beserta saran untuk perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja ke depan.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 memiliki tujuan adalah:

1. Menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Badan Pendapatan Daerah.
2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Badan Pendapatan Daerah sebagai institusi perencanaan pembangunan dalam mencapai target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

## 1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

**”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Visi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

## 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visinya tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

**“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”**

Misi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan misi ke 5 (lima) dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

### **3. Tujuan**

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sementara itu, Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goal*) serta dapat memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**”Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah”**

### **4. Sasaran**

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka pendek (1 tahun). Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah :

**“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah” dan  
“Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah”**

**5. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun sebagai berikut

Tabel 2.1  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$\frac{\text{PAD Tahun } n - \text{PAD Tahun } n - 1}{\text{PAD Tahun } n - 1} \times 100\%$	1,50 %
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Penilaian dari Inspektrot	87,52

## B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2022 dimulai sejak tahun 2021 yang mendasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Unit Internal yang Terlayani dengan Baik</b>	<b>IKM internal Bapenda</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi PD Yang Tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang Tersusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang Tersusun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan ATK

<b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
1	2	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>
Pengadaan Mebel	Tersedianya Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbayarkan</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Terbayarkan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/Tenaga Pengamanan/Sopir yang Menerima Gaji/Honor
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Baik	Jumlah STNK yang Terlunasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah
	Meningkatnya Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penilaian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun
	Tersedianya Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia
	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah yang Tersusun
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Analisa Potensi dan Kebijakan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terseenggaranya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersusunnya Database Obyek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Didata dan Dimutakhirkan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersusunnya Dokumen Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Dilakukan Penilaian Baik Massal Maupun Individual
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terseenggaranya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan yang Tersedia
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pajak Daerah yang Tersusun
Penagihan Pajak Daerah	Tersusunnya laporan penagihan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya Permohonan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Berkas Keberatan Pajak Daerah yang Terselesaikan
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Daerah yang Tersusun
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Retribusi Daerah yang Tersusun

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja tahun 2023 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kepala Badan (Eselon 2) berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah  
Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1,50 %
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	87,52

Penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan pada bulan Januari 2023, yang isinya merupakan penjabaran dari IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun Perjanjian Kinerja untuk eselon III sampai dengan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4  
Perjanjian Kinerja Eselon III  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan  
Tahun 2023

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja PD yang tersusun	4 dokumen	<b>Sekretaris</b>
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	21 laporan	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	100%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	15 unit	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	16 Laporan	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan PD yang terpelihara	109 unit	
8	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penetapan	4 dokumen	<b>Kabid Perencanaan dan Penetapan</b>
		Jumlah Dokumen Penagihan Pajak Daerah dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah yang tersusun	8 dokumen	<b>Kabid Pelayanan dan Penagihan</b>
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	8 laporan	<b>Kabid Pengawasan dan Pelaporan</b>

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Eselon IV  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan  
Tahun 2023

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	2	3	4	5
<b>I Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	4 dokumen	<b>Kasubag Perencanaan dan Evaluasi</b>
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD yang tersusun	5 Laporan	
<b>II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	43 orang	<b>Kasubag Keuangan</b>
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	3 Laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulana/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	
<b>III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan yang tersedia	1 Paket	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	50 Peserta	
<b>IV Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 Paket	<b>Kasubag Umum dan Kepegawaian</b>
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang tersedia	1 Paket	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang tersedia	3 paket	

4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 paket	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	3 dokumen	

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	2	3	4	5
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	Kasubag Umum dan Kepegawaian
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1	Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang tersedia	3 unit	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	12 unit	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia	4 jenis	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	4 jenis	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	4 jenis	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	4 jenis	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	25 unit	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan pajaknya	25 unit	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	58 unit	

4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	1 unit	
---	--	--	--------	--

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	2	3	4	5
<b>VIII Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>				
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah yang Tersusun	4 dokumen	<b>JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda</b>
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak, dan Wajib Pajak Daerah	4 laporan	<b>Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran</b>
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOPnya	180.000 obyek pajak	<b>Kasubbid Penetapan</b>
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 dokumen	<b>Kasubbid Penetapan</b>
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pajak Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	<b>Sub Koordinator Pelayanan dan Konsultasi</b>
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 layanan	

9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	4 dokumen	<b>Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan</b>
10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	<b>Kasubbid Penagihan</b>
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	<b>Kasubbid Penyelesaian Keberatan dan Banding</b>
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	Sub Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	<b>Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian</b>
15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	<b>JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

##### 1) Pencapaian Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85 – 100	=	Sangat baik/sangat berhasil ;
70 - < 85	=	Baik/berhasil ;
55 - < 70	=	Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55	=	Sangat kurang baik/tidak berhasil.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan

kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan:

Tabel 3.1  
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan  
Tahun 2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	1,50%	18,77%	-2,93%	-4,09%	1,40%	93,33%	
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,52				87,50	99,98%	
<b>Rata-rata</b>									<b>96,66%</b>

Berdasarkan tabel 3.1 Sasaran Kinerja yang pertama yakni Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar 1,40% dari target 1,50% atau tercapai sebesar 93,33%. Sedangkan untuk Sasaran Kinerja yang kedua dengan indikator Nilai SAKIP Bapenda realisasinya 87,50. Untuk PAD tidak mencapai target, karena 7 Pajak Daerah tidak mencapai target (98,17%). Alasan tidak tercapai target akan dijelaskan di bawah ini :

1. Pajak Hotel (97,06%)

Tidak tercapainya pajak hotel sesuai dengan target yang telah ditetapkan disebabkan adanya kecenderungan menurunnya tingkat hunian hotel sehingga memengaruhi jumlah pendapatan

2. Pajak Restoran (96,80%)

Tidak tercapai pajak restoran karena belum seluruh objek pajak restoran membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditentukan, sehingga perlu ditingkatkan lagi kesadaran dalam membayar pajak.

3. Pajak Hiburan (67,13%)

Tidak tercapai pajak hiburan karena realisasi dari salah satu objek pajak hiburan yaitu pajak pameran yang belum optimal dikarenakan masih rendahnya tingkat kunjungan di objek wisata sehingga memengaruhi penerimaan pajak hiburan.

4. Pajak Parkir (81,30%)

Tidak tercapainya pajak parkir karena masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan dan pembayaran sesuai dengan tarif yang ditentukan.

5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan(Minerba) (98,29%)

Tidak tercapainya pajak minerba karena banyak pengusaha tambang yang berhenti beroperasi akibat dari ijin usaha tambang yang sudah tidak berlaku dan belum diperpanjang.

6. Pajak Bumi dan Bangunan P2 (PBB P-2) (93,10%)

Tidak tercapainya pajak PBB P-2 karena adanya penyesuaian data objek dan subjek pajak PBB P-2 hal ini memengaruhi jumlah pajak yang dibayarkan mengalami penurunan sehingga secara kumulatif capaian Pajak PBB P-2 tidak tercapai.

7. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(BPHTB)

Tidak tercapainya pajak BPHTB dikarenakan BPHTB merupakan pajak yang bersifat transaksional dan untuk peralihan hak tahun 2023 banyak berasal dari perorangan yang objeknya kecil sedangkan perolehan hak dari sector usaha besar lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya sehingga hal tersebut berdampak pada capaian penerimaan BPHTB.

Evaluasi dan analisis secara rinci terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

**I. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Sasaran Strategis yang pertama yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Indikator persentase peningkatan PAD terealisasi sebesar 1,40% dari target 1,50% atau tercapai sebesar 93,33%. Realisasi 2023 mengalami kenaikan sebesar 3,72%. Adapun penurunan PAD dari sektor Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2  
Persentase Peningkatan PAD Tahun 2023

No.	Jenis PAD	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp.	%
1.	Pajak Daerah	154.083.648.100,00	160.187.718.511,56	6.104.070.411,56	3,96%

2.	Retribusi Daerah	23.605.842.847,89	18.784.931.531,00	(4.820.911.316,89)	-20,42%
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	17.199.695.333,86	22.627.048.677,73	5.427.353.343,87	31,55%
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	314.089.228.141,08	326.300.870.812,86	12.211.642.671,78	3,89%
	<b>Jumlah</b>	<b>508.978.414.422,8 3</b>	<b>527.900.569.533,1 5</b>	<b>18.922.155.110,32</b>	<b>3,72 %</b>

Dari tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yakni sebesar 3,72%. Dari sektor Pajak Daerah meningkat sebesar 3,96%, sektor Retribusi Daerah menurun sebesar -20,42%. Namun, untuk sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah meningkat sebesar 31,55% dan Lain-Lain PAD yang Sah mengalami kenaikan yaitu 3,89%.

#### a. Pajak Daerah

Sektor pajak daerah terealisasi sebesar Rp.160.187.718.511,56 atau sebesar 98,18% dari target Rp163.163.536.500,00. Realisasi ini meningkat sebesar 3,83% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3

#### Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023

No.	Jenis Pajak Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Pajak Hotel	1.814.165.586,00	2.028.979.856,00	466.712.195,00	34,64
2.	Pajak Restoran	8.265.728.031,00	9.569.023.252,00	2.832.787.832,00	52,14
3.	Pajak Hiburan	4.633.254.824,00	5.401.799.358,00	2.962.208.613,00	177,27

4.	Pajak Reklame	2.278.873.113,00	2.759.168.718,00	-360.591.813,00	-13,66
5.	Pajak Penerangan Jalan	65.084.797.087,00	69.009.324.039,00	9.512.673.631,00	17,12
6.	Pajak Parkir	1.180.416.077,00	1.219.526.677,00	345.099.077,00	41,31
7.	Pajak Air Tanah	703.918.793,00	810.353.934,50	56.481.232,00	8,72
8.	Pajak Sarang Burung	8.617.500,00	8.030.000,00	7.192.500,00	504,74
9.	Pajak Minerba	1.283.963.500,00	1.134.678.200,00	-179.881.400,00	-12,29
10.	PBB-P2	43.074.241.525,00	44.740.135.803,06	-547.984.363,00	-1,26
11	BPHTB	25.755.672.064,00	23.506.698.674,00	4.584.406.180,00	21,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>154.083.648.100,00</b>	<b>160.187.718.511,56</b>	<b>6.104.070.411,56</b>	<b>3,96%</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 11 jenis pajak daerah terdapat 8 jenis pajak daerah mengalami peningkatan, antara lain : Pajak Hotel meningkat sebesar 11,84%, Pajak Restoran meningkat sebesar 15,77%, Pajak Hiburan meningkat sebesar 16,59%, Pajak Penerangan Jalan meningkat sebesar 6,03%, Pajak Parkir meningkat sebesar 3,31%, Pajak Air Tanah meningkat sebesar 15,12%, Pajak Reklame meningkat sebesar 21,08%, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meningkat sebesar 3,87%. Sedangkan 3 jenis pajak daerah yang mengalami penurunan yaitu Pajak Sarang Burung Walet mengalami penurunan sebesar -6,82% dan BPHTB menurun sebesar -8,73%, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurun sebesar -11,63%.

## 2) Retribusi Daerah

Sektor retribusi daerah terealisasi sebesar Rp.18.784.931.531,00 atau sebesar 91,47% dari target Rp20.535.686.700,00. Realisasi ini menurun sebesar -20,42% bila dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa jenis retribusi

daerah yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	9.390.404.516,69	60.302.500,00	-9.330.102.016,69	-99,36%
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.872.483.000,00	7.854.459.000,00	-18.024.000,00	-0,23%
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.043.138.000,00	871.736.000,00	-171.402.000,00	-16,43%
4.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.280.000,00	75.160.000,00	9.880.000,00	15,13%
5.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	112.359.200,00	151.056.900,00	38.697.700,00	34,44%
6.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.039.044.195,00	1.056.713.490,00	17.669.295,00	1,70%

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan	
				Rp.	%
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.523.694.405,00	1.725.351.933,00	201.657.528,00	13,23%
8.	Retribusi Tempat Pelelangan	467.250.000,00	2.246.687.075,00	1.779.437.075,00	380,83%
9.	Retribusi Terminal	27.121.000,00	30.089.000,00	2.968.000,00	10,94%
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.050.000,00	250.245.000,00	50.195.000,00	25,09%
11.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.345.992.000,00	1.663.665.000,00	317.673.000,00	23,60%
12.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	519.026.531,20	2.049.135.633,00	1.530.109.101,80	294,80%

13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	750.330.000,00	750.330.000,00	-
<b>JUMLAH</b>		<b>23.605.842.847,89</b>	<b>18.784.931.531,00</b>	<b>-4.820.911.316,89</b>	<b>-20,42%</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 13 retribusi daerah terdapat 10 jenis retribusi daerah mengalami peningkatan, antara lain : Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meningkat sebesar 15,13%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meningkat sebesar 34,44%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meningkat sebesar 1,70% , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat sebesar 13,23%, Retribusi Tempat Pelelangan meningkat sebesar 380,83%, Retribusi Terminal meningkat sebesar 0,29%, Retribusi Rumah Potong Hewan meningkat sebesar 11,78%, Retribusi Terminal meningkat sebesar 10,94% dan Retribusi Rumah Potong Hewan meningkat sebesar 25,09%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meningkat sebesar 23,60%, dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan meningkat sebesar 294,80%,Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ada realisasi sebesar Rp750.330.000,00 . Sedangkan 3 jenis retribusi daerah lainnya mengalami penurunan antara lain : Retribusi Pelayanan Kesehatan menurun sebesar -99,36%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menurun sebesar -0,23%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurun sebesar -16,43%.

### 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 17.199.695.333,86 atau sebesar 75,25% dari target Rp. 22.855.892.314,00. Realisasi ini menurun sebesar 10,31% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5  
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Dividen dari PT. BANK JATIM	5.279.697.394,65	5.378.989.343,35	99.291.948,70	1,88
2.	Dividen dari PD Bank Daerah	3.438.372.106,21	4.153.125.685,38	714.753.579,17	20,79
3.	Dividen dari Lamongan Integreted Shorebase	899.329.833,00	577.950.111,00	-321.379.722,00	-35,74
4.	Dividen dari Aneka Usaha Lamongan Jaya	325.000.000,00	350.000.000,00	25.000.000,00	7,69
5.	Dividen dari PD Pasar Lamongan	1.007.296.000,00	1.250.000.000,00	242.704.000,00	24,09
6.	Dividen dari PT Wisata Bahari Lamongan	4.500.000.000,00	6.750.000.000,00	2.250.000.000,00	50,00
7.	Dividen dari PDAM	1.750.000.000,00	4.166.983.538,00	2.416.983.538,00	138,11
	<b>JUMLAH</b>	<b>17.199.695.333,86</b>	<b>22.627.048.677,73</b>	<b>5.427.353.343,87</b>	<b>31,55</b>

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 7 Dividen BUMD terdapat 6 dividen BUMD yang mengalami peningkatan, antara lain ; PT. Bank Jatim meningkat sebesar 1,88%, PT PD Bank Daerah meningkat sebesar 20,79%, Aneka Usaha Lamongan Jaya meningkat sebesar 7,69%, PD Pasar Lamongan meningkat sebesar 24,09%, PDAM meningkat sebesar 138,11%, PT Wisata Bahari Lamongan meningkat sebesar 50% Sedangkan 1 dividen BUMD mengalami penurunan yakni : Lamongan Integreted Shorebase menurun sebesar -35,74%.

#### 4) Lain-Lain PAD yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah terealisasi sebesar Rp. 323.445.671.372,01 atau sebesar 104,70% dari target Rp. 311.656.460.000,00. Realisasi ini meningkat sebesar 2,98% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel di bawah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 10 jenis Lain-Lain PAD yang Sah, terdapat 4 jenis Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan antara lain Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan meningkat sebesar 6389%, Jasa Giro meningkat sebesar 2,22%, Pendapatan Denda Pajak Daerah meningkat sebesar 61,79%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah meningkat sebesar 831%, sedangkan Pendapatan BLUD meningkat sebesar 3,44%. jenis Lain-Lain PAD yang Sah lainnya mengalami penurunan yakni Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan menurun sebesar -91,79%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah menurun sebesar -100%, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP menurun sebesar -100%, Pendapatan BLUD menurun sebesar 5,78% dan Pendapatan dan Pengembalian Lainnya menurun sebesar -99%. Untuk Hasil Kerja Sama Daerah tidak ada penurunan/peningkatan dan terealisasi sebesar Rp133.650.000,00.

Tabel 3.6  
Lain-Lain PAD yang Sah  
Tahun 2023

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	63.242.500,00	4.103.940.800,00	4.040.698.300,00	6389%
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0	-	0%
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	133.650.000,00	133.650.000,00	-	0%
4.	Jasa Giro	1.659.644.695,48	1.696.542.262,26	36.897.566,78	2,22%

5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	771.562.018,11	63.320.333,59	(708.241.684,52)	- 91,79 %
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	70.499.995,00	114.063.273,00	43.563.278,00	61,79 %
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	89.376,00		(89.376,00)	- 100,00 %
8.	Pendapatan BLUD	306.737.481.324,06	317.288.573.821,09	10.551.092.497,03	3,44%
9.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	103.472.677,45		(103.472.677,45)	- 100,00 %
10.	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	4.559.329.590,98	45.580.882,07	(4.513.748.708,91)	- 99,00 %
	<b>JUMLAH</b>	314.098.972.177,08	323.445.671.372,01	9.346.699.194,93	2,98%

## II. Sasaran Strategis Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Sasaran Strategis yang kedua yakni Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan Realisasi Nilai SAKIP Bapenda sampai dengan Laporan LKJIP ini disusun masih belum diliris oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7

Nilai Sakip Bapenda Tahun 2023

INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TARGET KINERJA 2023				REALISASI 2023				CAPAIAN 2023				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	Akhir Tahun
Nilai SAKIP Bapenda	87,56	87,52	-	-	87,52	-	-	-	87,50	-	-	-	99,98%	99,98%

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8  
Perbandingan Realisasi Kinerja  
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022			TAHUN 2023			SELISIH
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Peningkatan PAD	1,50%	-15,81%	-617,58%	1,50%	1,40%	93,33%	-109%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,51	87,56	99,94%	87,52	87,50	99,98%	-0,07%
	Rata-Rata				-259%			96,66%	-54,46%

Dari tabel tersebut terlihat capaian realisasi kinerja tahun 2023 dilihat dari indikator presentase peningkatan PAD tahun 2023 tercapai 93,33%. sedangkan tahun 2022 tercapai sebesar -617,58% atau menurun sebesar -109%, Untuk indikator Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah yang diukur dari Nilai SAKIP Bapenda pada Tahun 2023 realisasinya 87,50 dengan capaian 99,98%, sedangkan tahun 2022 realisasinya 87,56 dengan capaian sebesar 99,94%.

### 3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD/Renstra.

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 bila dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode RPJMD/Renstra bisa dilihat pada tabel berikut berikut :

Tabel 3.9  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023  
Dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD/Renstra

No.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2023		Target Akhir Periode RPJMD	Tingkat Kemajuan
			TARGET	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	1,50%	1,40%	2,60%	53,85%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,52	87,50	87,55%	9994,29%
	Rata-Rata					5024,07%

Dari tabel tersebut belum terlihat realisasi kinerja tahun 2023 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD/Renstra belum bisa diketahui rata-rata karena nilai SAKIP belum rilis. Indikator kinerja Persentase Peningkatan PAD terdapat kemajuan sebesar 53,85%, sedangkan untuk Indikator Nilai Sakip Bapenda tingkat kemajuannya 9.994,29% .

### 4) Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 sebagaimana tersebut di atas antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;

2. Kompetensi pegawai yang terus menerus ditingkatkan;
3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Adanya regulasi yang jelas terkait pendapatan daerah;
5. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
6. Adanya UPT Wilayah Kecamatan Lamongan, UPT Wilayah Kecamatan Ngimbang, UPT Wilayah Kecamatan Babat, UPT Wilayah Kecamatan Babat dalam menunjang aktivitas menggali potensi pajak daerah.

#### **5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*).

Tujuan dari *Cost per Outcome* adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Perhitungan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya  
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan  
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
2	3	4	5	6
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Presentase Peningkatan PAD	93,33%	90,39%	2,95%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	99,98%	89,58%	10,40%
Rata-Rata				6,67%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator presentase peningkatan PAD terdapat efisiensi sebesar 2,95%, sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Bapenda terdapat efisiensi sebesar 10,40%.

## 6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 38 Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja. Pada tabel 3.10 dan tabel 3.11 menyajikan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan tahun 2023.

Tabel 3.11  
Capaian Kinerja Program  
Tahun 2023

No.	PROGRAM	INDIKATOR KERJA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Internal Bapenda	86	88,84%	1,03%	14.161.336.805	Rp12.685.642.960,00	89,58%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Presentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,52%	4,20%	807,66%	6.274.886.095	Rp5.671.671.826,00	90,39%
		Presentase Peningkatan Pajak Daerah	3,27%	3,96%	121,13%			
		Presentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	1,87%	2941,56%	157302,77%			
		<b>Rata-Rata</b>			<b>52743,85%</b>			
		<b>Rata-Rata Kinerja</b>			<b>26372,44%</b>			<b>89,98%</b>

Dari tabel capaian kinerja program di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 26.372,44%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 1,03% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 52.743,85%. Adapun realisasi anggaran rata-rata tercapai sebesar 89,58%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 89,58% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 90,39%.

Tabel 3.12  
Capaian Kinerja Kegiatan  
Tahun 2023

No	Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100%	130.000.000	128.560.886,00	98,89%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 laporan	15 laporan	100%	12.085.986.505	10.658.852.907,00	88,19%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	245.361.000	242.238.595,00	98,73%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	212.997.000	204.112.458,00	95,83%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 unit	15 unit	100%	150.915.000	150.215.000,00	99,54%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	1.018.271.400	996.066.614,00	97,82%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76 unit	76 unit	100%	317.805.900	305.596.500,00	96,16%
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	28 dokumen	28 dokumen	100%	6.274.886.095	5.671.671.826,00	90,39%
		20 laporan	20 laporan	100%			
		11 unit	11 unit	100%			
		6 layanan	6 layanan	100%			
		180000 objek pajak	180000 objek pa	100%			
Rata-Rata				100%			95,69%

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 95,69%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 4,31%. Selanjutnya untuk capaian kinerja sub kegiatan sebagaimana tabel di bawah, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 87,87%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 90,81%.

Tabel 3.13  
Capaian Kinerja Sub Kegiatan  
Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100%	Rp55.000.000,00	Rp54.997.350,00	100,00%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	Rp75.000.000,00	Rp73.563.536,00	98,08%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	43 orang/bulan	100%	Rp11.995.986.505,00	Rp10.569.147.407,00	88,11%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan	100%	Rp50.000.000,00	Rp49.862.750,00	99,73%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 laporan	18 laporan	100%	Rp40.000.000,00	Rp39.842.750,00	99,61%
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1 paket	100%	Rp53.000.000,00	Rp52.470.000,00	99,00%
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 orang	100 orang	100%	Rp192.361.000,00	Rp189.768.595,00	98,65%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 paket	1 paket	100%	Rp10.686.000,00	Rp10.676.700,00	99,91%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 paket	1 paket	100%	Rp21.238.000,00	Rp14.726.200,00	69,34%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 paket	3 paket	100%	Rp79.950.000,00	Rp79.866.300,00	99,90%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	1 paket	100%	Rp42.529.800,00	Rp42.497.105,00	99,92%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 dokumen	3 dokumen	100%	Rp13.600.000,00	Rp13.320.000,00	97,94%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan	4 laporan	100%	Rp44.993.200,00	Rp43.026.153,00	95,63%
14	Pengadaan Mebel	5 unit	5 unit	100%	Rp6.000.000,00	Rp5.940.000,00	99,00%
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 unit	12 unit	100%	Rp144.915.000,00	Rp144.275.000,00	99,56%
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 laporan	100%	Rp4.600.000,00	Rp4.596.500,00	99,92%
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	4 laporan	100%	Rp412.486.000,00	Rp407.417.634,00	98,77%
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 laporan	4 laporan	100%	Rp15.217.400,00	Rp11.599.700,00	76,23%
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4 laporan	4 laporan	100%	Rp585.968.000,00	Rp572.452.780,00	97,69%
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25 unit	25 unit	100%	Rp17.500.000,00	Rp8.178.100,00	46,73%

21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25 unit	25 unit	100%	Rp266.305.900,00	Rp263.523.400,00	98,96%
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61 unit	61 unit	100%	Rp30.000.000,00	Rp29.895.000,00	99,65%
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100%	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	100,00%
24	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Rp40.000.000,00	Rp35.490.000,00	88,73%
25	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Rp -	Rp -	0,00%
26	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	Rp216.969.000,00	Rp214.075.000,00	98,67%
27	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 unit	11 unit	100%	Rp75.000.000,00	Rp74.866.200,00	99,82%
28	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	Rp1.026.500.000,00	Rp917.710.000,00	89,40%
29	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	Rp15.000.000	Rp14.950.000	99,67%
30	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	80000 objek paja	180000 objek pajak	100%	Rp30.000.000,00	Rp29.950.000,00	99,83%
31	Penetapan Wajib Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Rp514.438.500,00	Rp514.438.500,00	100,00%
32	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	6 layanan	6 layanan	100%	Rp253.040.000,00	Rp251.560.000,00	99,42%
33	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Rp115.040.500,00	Rp113.821.920,00	98,94%
34	Penagihan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Rp3.287.000.000,00	Rp2.860.978.556,00	87,04%
35	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Rp20.000.000,00	Rp7.840.000,00	39,20%
36	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100%	Rp380.110.000,00	Rp334.390.500,00	87,97%
37	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	Rp297.858.095,00	Rp297.671.150,00	99,94%
38	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 laporan	4 laporan	100%	Rp3.930.000,00	Rp3.930.000,00	100,00%
<b>Rata-rata</b>				<b>100%</b>			<b>90,81%</b>

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar sebesar Rp18.357.314.786,00 atau mencapai 89,83% dari total pagu Rp20.436.222.900,00 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14  
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Lamongan Tahun 2023

Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp14.161.336.805,00</b>	<b>Rp12.685.642.960,00</b>	<b>89,58%</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp130.000.000,00</b>	<b>Rp128.560.886,00</b>	<b>98,89%</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp55.000.000,00	Rp54.997.350,00	100,00%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp75.000.000,00	Rp73.563.536,00	98,08%
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Rp12.085.986.505,00</b>	<b>Rp10.658.852.907,00</b>	<b>88,19%</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp11.995.986.505,00	Rp10.569.147.407,00	88,11%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp50.000.000,00	Rp49.862.750,00	99,73%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp40.000.000,00	Rp39.842.750,00	99,61%
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp245.361.000,00</b>	<b>Rp242.238.595,00</b>	<b>98,73%</b>
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp53.000.000,00	Rp52.470.000,00	99,00%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp192.361.000,00	Rp189.768.595,00	98,65%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp212.997.000,00</b>	<b>Rp204.112.458,00</b>	<b>95,83%</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp10.686.000,00	Rp10.676.700,00	99,91%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp21.238.000,00	Rp14.726.200,00	69,34%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp79.950.000,00	Rp79.866.300,00	99,90%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp42.529.800,00	Rp42.497.105,00	99,92%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp13.600.000,00	Rp13.320.000,00	97,94%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp44.993.200,00	Rp43.026.153,00	95,63%
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp150.915.000,00</b>	<b>Rp150.215.000,00</b>	<b>99,54%</b>
Pengadaan Mebel	Rp6.000.000,00	Rp5.940.000,00	99,00%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp144.915.000,00	Rp144.275.000,00	99,56%
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp1.018.271.400,00</b>	<b>Rp996.066.614,00</b>	<b>97,82%</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp4.600.000,00	Rp4.596.500,00	99,92%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp412.486.000,00	Rp407.417.634,00	98,77%
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp15.217.400,00	Rp11.599.700,00	76,23%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp585.968.000,00	Rp572.452.780,00	97,69%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp317.805.900,00</b>	<b>Rp305.596.500,00</b>	<b>96,16%</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp17.500.000,00	Rp8.178.100,00	46,73%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp266.305.900,00	Rp263.523.400,00	98,96%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp30.000.000,00	Rp29.895.000,00	99,65%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp4.000.000,00	Rp4.000.000,00	100,00%

<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	Rp6.274.886.095,00	Rp5.671.671.826,00	90,39%
<b>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>	Rp6.274.886.095,00	Rp5.671.671.826,00	90,39%
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp40.000.000,00	Rp35.490.000,00	88,73%
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp -	Rp -	0,00%
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp216.969.000,00	Rp214.075.000,00	98,67%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Rp75.000.000,00	Rp74.866.200,00	99,82%
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp1.026.500.000,00	Rp917.710.000,00	89,40%
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp15.000.000,00	Rp14.950.000,00	99,67%
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp30.000.000,00	Rp29.950.000,00	99,83%
Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp514.438.500,00	Rp514.438.500,00	100,00%
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp253.040.000,00	Rp251.560.000,00	99,42%
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp115.040.500,00	Rp113.821.920,00	98,94%
Penagihan Pajak Daerah	Rp3.287.000.000,00	Rp2.860.978.556,00	87,04%
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp20.000.000,00	Rp7.840.000,00	39,20%
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp380.110.000,00	Rp334.390.500,00	87,97%
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp297.858.095,00	Rp297.671.150,00	99,94%
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Rp3.930.000,00	Rp3.930.000,00	100,00%
<b>Jumlah</b>	<b>Rp20.436.222.900,00</b>	<b>Rp18.357.314.786,00</b>	<b>89,83%</b>

Adapun rincian penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp55.000.000,00 , yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Adapun realisasi keuangan sebesar 100% dan fisik sebesar 100%.
  - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp75.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen evaluasi kinerja. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,08% dan fisik sebesar 100%.
- b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.995.986.505,00, yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bapenda. Adapun realisasi keuangan sebesar 88,11% dan fisik sebesar 100%;
  - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,73% dan fisik sebesar 100%;
  - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,61% dan fisik sebesar 100%.

c. Administrasi Kepegawaian

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp53.000.000,00, yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya. Adapun realisasi keuangan sebesar 99% dan fisik sebesar 100%.
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp192.361.000,00, yang dipergunakan untuk pelaksanaan diklat ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,65% dan fisik sebesar 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp10.686.000,00, yang dipergunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,91% dan fisik sebesar 100%;
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga , dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.238.000,00, yang dipergunakan untuk penyediaan peralatan rumah tangga kantor seperti lemari dan alat pendingin. Adapun realisasi keuangan sebesar 69,34% dan fisik sebesar 100%;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp79.950.000,00, yang dipergunakan untuk penyediaan alat tulis kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,90% dan fisik sebesar 100%;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.529.800,00 yang dipergunakan untuk pengadaan barang

- cetakan/penggandan (18 cetakan), Adapun realisasi keuangan sebesar 99,92 % dan fisik sebesar 100%;
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.600.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan (108 eksemplar surat kabar), Adapun realisasi keuangan sebesar 97,94% dan fisik sebesar 100%.
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Mebel dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian kursi rapat 33 unit, Adapun realisasi keuangan sebesar 99% dan fisik sebesar 100%.
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp144.915.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian printer, Adapun realisasi keuangan sebesar 99,56% dan fisik sebesar 100%.
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.600.000,00 yang dipergunakan untuk membeli benda pos(materai), Adapun realisasi keuangan sebesar 99,92% dan fisik sebesar 100%;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp412.486.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran tagihan telpon, OCA blast, dan internet, Adapun realisasi keuangan sebesar 98,77% dan fisik sebesar 100%;

- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.217.400,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan rumah tangga. Adapun realisasi keuangan sebesar 76,23% dan fisik sebesar 100%;
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp585.968.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer sebanyak 26 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar 97,69% dan fisik sebesar 100%.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.500.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (20 sepeda motor dan 5 mobil). Adapun realisasi keuangan sebesar 46,73% dan fisik sebesar 100%;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp266.305.900,00 yang dipergunakan untuk service kendaraan bermotor dan pembelian BBM (20 sepeda motor dan 5 mobil). Adapun realisasi keuangan sebesar 98,96% dan fisik sebesar 100%;

- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor (CPU dan komputer, printer, dan laptop, 13 unit AC). Adapun realisasi keuangan sebesar 99,65% dan fisik sebesar 100%;
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya. Adapun realisasi keuangan sebesar 100% dan fisik sebesar 100%;
- h. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp40.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen rencana pengelolaan pajak daerah (4 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar 88,73% dan fisik sebesar 100%;
  - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen SOP (4 SOP). Adapun realisasi keuangan sebesar 0% dan fisik sebesar 100%;
  - 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp216.969.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah (4 laporan). Adapun realisasi keuangan sebesar 98,67% dan fisik sebesar 100%;
  - 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.000.000,00 yang dipergunakan untuk

- pengadaan blanko SPTPD dan SSPD sebanyak 577 buku. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,82% dan fisik sebesar 100%;
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.026.500.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen Zona Nilai Tanah di Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar 89,40% dan fisik sebesar 100%;
- 6) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp15.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,67% dan fisik sebesar 100%;
- 7) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp30.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyesuaian NJOP. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,83% dan fisik sebesar 100%;
- 8) Penetapan Wajib Pajak Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp514.438.500,00 yang dipergunakan untuk pencetakan SPPT dan DHKP PBB. Adapun realisasi keuangan sebesar 100% dan fisik sebesar 100%;
- 9) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp253.040.000,00 yang dipergunakan untuk sosialisasi pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,42% dan fisik sebesar 100%;

- 10) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp115.040.500,00 yang dipergunakan untuk menjumlah data pelaporan pajak daerah yang telah diteliti dan diverifikasi. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,94% dan fisik sebesar 100%;
- 11) Penagihan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.287.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyisiran PBB di Desa-Desa se Kab. Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar 87,04% dan fisik sebesar 100%;
- 12) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan penyelesaian keberatan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan 39,20% dan fisik sebesar 100%;;
- 13) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp380.110.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 87,97% dan fisik sebesar 100%;
- 14) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp297.858.095,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen pembinaan dan pengawasan retribusi daerah serta pembayaran gaji petugas cheker sebanyak 18 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,94% dan fisik sebesar 100%.

15) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.930.000,00 yang dipergunakan untuk laporan pengembangan ETPD. Adapun realisasi keuangan sebesar 100% dan fisik sebesar 100%.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran kinerja Bapenda yang pertama yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar 1,40% dari target 1,50% atau tercapai sebesar 93,33%. Sedangkan untuk Sasaran Kinerja yang kedua dengan indikator Nilai Sakip Bapenda sebesar 87,50, target nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 87,52, sedangkan untuk realisasi nilai SAKIP tahun 2022 tercapai sebesar 87,56.
2. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Badan Pendapatan untuk Indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat efisiensi sebesar 2,95%, sedangkan untuk indikator Nilai SAKIP Bapenda Tahun 2023 efisiensinya 10,40%.

3. Capaian kinerja program tercapai rata-rata sebesar 26.372,44% dan capaian anggaran rata rata sebesar 89,98%, sehingga terdapat efisiensi sebesar 26.282,55%. Capaian kinerja kegiatan tercapai sebesar 100% dan anggaran tercapai sebesar 95,69% sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 4,31%. Sedangkan untuk capaian kinerja sub kegiatan tercapai sebesar 100% dan anggaran tercapai sebesar 90,81% sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 9,19%.

## **B. Saran**

Beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja ke depan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi secara intens baik melalui media cetak maupun elektronik.
- b. Meningkatkan kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah melalui Pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait pajak daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data (*updating data*) obyek/subyek pajak daerah.
- d. Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
- f. Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan penggalian potensi-potensi baru.
- g. Melakukan perawatan server pajak daerah secara berkala.

Sebagai bagian penutup, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang.